



Dampak Sosial Budaya Pariwisata terhadap Komunitas Lokal di Destinasi Wisata Alam

Ursula Ariyani Darmawan

Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: ursula.ariyani@student.unram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

07 August 2025

Manuscript revised:

15 August 2025

Accepted for publication:

16 August 2025

Abstract

Tourism development in natural attractions often brings both positive and negative implications for the local communities. This study aims to analyze the sociocultural impacts of tourism on local communities in nature-based tourist destinations in Indonesia. The research uses a qualitative approach with case studies in several national parks and protected forest areas that have become major tourist attractions. Data collection techniques include interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that tourism has significantly influenced community behavior, local traditions, and value systems. On one hand, tourism has increased intercultural exchange, income, and education awareness. On the other hand, it has caused commercialization of culture, cultural identity dilution, and social conflicts due to land use and economic inequality. This research contributes to a better understanding of the complexities of tourism development, and suggests that a participatory approach to tourism management involving local communities is crucial to maintain the sociocultural sustainability of destinations. Future studies should consider longitudinal analysis and comparative research across different cultural settings.

Keywords

cultural impact;
social change;
local communities;
nature-based tourism;
tourism development

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Darmawan, U.A. (2025). Dampak Sosial Budaya Pariwisata terhadap Komunitas Lokal di Destinasi Wisata Alam. *Tourism and Hospitality Research*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.54>

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam beberapa dekade terakhir di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Negara kepulauan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari pegunungan, hutan tropis, danau, hingga garis pantai yang panjang, serta didukung oleh keanekaragaman budaya yang unik dan khas di setiap daerah. Potensi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Asia Tenggara. Dalam konteks wisata alam, destinasi seperti taman nasional, hutan lindung, dan kawasan pegunungan telah menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara (Keane, 1992). Wisatawan tertarik tidak hanya oleh keindahan lanskap dan keanekaragaman hayati yang ditawarkan, tetapi juga oleh pengalaman budaya otentik yang dapat dijumpai di komunitas lokal sekitar destinasi.

Namun, pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan ini tidak hanya membawa dampak ekonomi yang positif, melainkan juga konsekuensi sosial dan budaya yang kompleks. Komunitas

lokal, yang sebelumnya menjalani kehidupan dengan pola tradisional dan bergantung pada sumber daya alam secara langsung, kini mengalami berbagai perubahan sebagai respons terhadap aktivitas pariwisata. Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar mendorong pergeseran nilai-nilai sosial, pola interaksi antarwarga, serta struktur ekonomi masyarakat. Selain itu, terjadi pula tekanan terhadap kelestarian budaya lokal, baik dalam bentuk komodifikasi tradisi maupun perubahan makna dari simbol-simbol budaya yang digunakan dalam pertunjukan wisata.

Perubahan-perubahan ini terjadi secara bertahap dan sering kali tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri, karena dibungkus dalam narasi kemajuan dan modernisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana dinamika pariwisata di kawasan wisata alam tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga terhadap dimensi sosial budaya komunitas lokal yang menjadi bagian integral dari destinasi tersebut. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang matang dan keterlibatan masyarakat, pariwisata justru dapat menjadi pemicu konflik sosial dan kerusakan budaya, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan destinasi itu sendiri.

Menurut Smith dan Robinson (2006), interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal tidak dapat dihindari dalam proses pariwisata, dan interaksi ini kerap menjadi titik awal dari berbagai perubahan sosial yang signifikan. Ketika masyarakat lokal berinteraksi secara intensif dengan wisatawan yang membawa nilai-nilai, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda, maka nilai-nilai sosial lokal yang telah terbentuk secara turun-temurun dapat mulai mengalami pergeseran. Perubahan ini dapat terlihat dalam pola komunikasi, cara berpakaian, gaya hidup, hingga cara pandang terhadap institusi tradisional seperti keluarga, adat, dan agama. Selain itu, struktur sosial masyarakat yang semula bersifat homogen dan tradisional sering kali tergeser oleh struktur baru yang lebih terbuka, kompetitif, dan berbasis pada logika ekonomi pasar.

Di satu sisi, pariwisata memang dapat menjadi sarana yang efektif dalam pelestarian budaya lokal. Ketika budaya menjadi daya tarik utama wisatawan, komunitas lokal memiliki insentif untuk melestarikan tarian, musik, kerajinan tangan, serta upacara adat yang mungkin sebelumnya mulai ditinggalkan. Selain itu, pemasukan dari sektor pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, dan memperbaiki infrastruktur lokal. Namun demikian, dampak positif ini tidak datang tanpa risiko. Kehadiran budaya luar yang terus-menerus dapat memicu proses akultivasi yang tidak seimbang, di mana budaya lokal mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri atau bahkan kehilangan identitas aslinya.

Lebih jauh lagi, pariwisata sering kali mendorong terjadinya komodifikasi budaya, yaitu ketika unsur-unsur budaya lokal diperlakukan sebagai barang dagangan untuk konsumsi wisatawan. Proses ini dapat mengakibatkan perubahan makna budaya, dari sesuatu yang sakral menjadi sekadar pertunjukan. Seperti yang diungkapkan oleh Mbaiwa (2011), dalam konteks ini masyarakat lokal terkadang terpaksa "menjual" budaya mereka demi keuntungan ekonomi, tanpa memahami konsekuensi jangka panjang terhadap integritas budaya itu sendiri. Selain itu, pertumbuhan sektor pariwisata juga bisa menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, terutama dalam hal perebutan sumber daya seperti lahan, akses terhadap wisatawan, dan pembagian keuntungan ekonomi. Konflik ini dapat memperlemah kohesi sosial dan memperparah ketimpangan sosial antar kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian, meskipun pariwisata membawa berbagai peluang, penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyadari bahwa perubahan sosial dan budaya yang ditimbulkan tidak selalu bersifat netral atau positif. Diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata yang berwawasan budaya, inklusif, dan berkelanjutan, agar manfaat pariwisata dapat dirasakan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri komunitas lokal.

Di Indonesia, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat lokal. Salah satu temuan penting datang dari Suansri (2003), yang menyoroti bagaimana

pariwisata dapat mendorong pergeseran gaya hidup masyarakat dari yang semula berbasis agraris—mengandalkan pertanian subsisten dan kegiatan ekonomi tradisional—menjadi lebih konsumtif dan bergantung pada sektor jasa. Perubahan ini biasanya terjadi secara bertahap, dimulai dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam industri jasa seperti penginapan, transportasi wisata, perdagangan suvenir, hingga jasa pemandu wisata. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap pariwisata bisa menyebabkan kerentanan ekonomi jika tidak diiringi dengan diversifikasi pendapatan atau kemampuan adaptasi yang kuat terhadap fluktuasi kunjungan wisatawan.

Selain itu, keberadaan dan eksistensi tradisi lokal yang telah lama menjadi identitas kultural masyarakat sering kali mengalami tekanan kuat akibat dinamika pasar wisata. Budaya yang sebelumnya dipraktikkan dalam konteks sakral atau komunitarian, kini dituntut untuk tampil dalam format yang lebih atraktif, visual, dan mudah dikonsumsi oleh wisatawan. Hal ini melahirkan proses seleksi budaya, di mana hanya elemen-elemen budaya yang menarik dan menjual yang dipertahankan, sementara praktik-praktik tradisional lainnya ditinggalkan atau tereduksi maknanya. Tekanan tersebut diperparah oleh adanya ekspektasi dari wisatawan dan agen perjalanan terhadap atraksi budaya yang seragam, terjadwal, dan mudah diakses, sehingga mendorong komunitas lokal untuk melakukan simplifikasi dan standarisasi terhadap praktik budaya yang sebenarnya kompleks dan bermuansa.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan perubahan identitas budaya kolektif masyarakat lokal. Generasi muda, yang lebih sering berinteraksi dengan wisatawan dan memiliki eksposur tinggi terhadap budaya global, cenderung mengalami perubahan preferensi budaya dan nilai hidup. Mereka mulai meninggalkan aktivitas tradisional seperti bertani atau mengikuti upacara adat, dan lebih tertarik pada pekerjaan yang berhubungan dengan dunia pariwisata dan gaya hidup modern. Jika tidak disikapi secara bijak, hal ini berpotensi memutus kesinambungan pewarisan budaya antargenerasi, serta memperlemah fondasi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun pariwisata memberikan peluang ekonomi yang menjanjikan, dampak sosial budaya yang menyertainya perlu mendapat perhatian serius. Intervensi kebijakan yang mengedepankan pelestarian budaya secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting agar budaya lokal tidak sekadar menjadi komoditas, melainkan tetap hidup sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan komunitas lokal itu sendiri.

Namun demikian, tidak semua dampak pariwisata bersifat negatif. Dalam sejumlah kasus, pariwisata justru terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pelestarian budaya dan penguatan identitas komunitas lokal. Gössling dan Hall (2006) menjelaskan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pariwisata dapat menjadi sarana revitalisasi budaya yang efektif, terutama di daerah-daerah yang mengalami tekanan modernisasi atau kehilangan fungsi sosial dari tradisi lokalnya. Ketika budaya lokal dijadikan sebagai daya tarik utama dalam kegiatan wisata, masyarakat terdorong untuk kembali menggali, mempertahankan, dan bahkan memperkenalkan kembali unsur-unsur budaya yang sempat ditinggalkan, seperti upacara adat, kerajinan tangan, arsitektur tradisional, dan bahasa daerah.

Lebih lanjut, pendekatan pariwisata berbasis komunitas atau community-based tourism (CBT) telah terbukti sebagai model yang mampu memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Melalui CBT, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pariwisata, tetapi juga menjadi subjek utama dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta pelaksanaan program-program wisata. Keterlibatan aktif ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap destinasi wisata, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri komunitas lokal dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya mereka. Studi oleh Scheyvens (1999) menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dalam CBT berhubungan erat dengan peningkatan kohesi sosial, solidaritas komunitas, serta pembentukan struktur sosial yang lebih adil dan inklusif.

Contoh konkret dari keberhasilan CBT dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia seperti Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta dan Desa Penglipuran di Bali, di mana masyarakat mampu mengelola

dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal sambil tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Di daerah-daerah ini, pariwisata telah menjadi instrumen untuk memperkuat identitas budaya dan membangun narasi kolektif masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, pariwisata menjadi katalisator untuk membangkitkan kembali semangat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan tradisi leluhur yang sebelumnya mulai terpinggirkan.

Dengan demikian, pariwisata tidak selalu menjadi ancaman terhadap budaya lokal. Sebaliknya, dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, pariwisata dapat menjadi motor penggerak yang memperkuat ikatan sosial masyarakat, meningkatkan kesadaran budaya, serta mendukung upaya pelestarian yang lebih berkelanjutan. Peran pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan akademisi sangat penting dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan CBT dan memastikan bahwa manfaat sosial budaya dari pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan penelitian masih terlihat cukup signifikan dalam hal pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial budaya yang berlangsung secara spesifik di kawasan wisata alam. Banyak kajian sebelumnya cenderung memfokuskan analisis pada aspek ekonomi, seperti kontribusi pariwisata terhadap pendapatan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, atau pertumbuhan sektor informal, serta pada aspek lingkungan seperti dampak pariwisata terhadap ekosistem, degradasi lahan, dan konservasi sumber daya alam. Sementara itu, dimensi sosial budaya—yang mencakup perubahan nilai, norma, perilaku kolektif, identitas komunitas, hingga ketegangan sosial yang muncul akibat transformasi sosial—belum banyak dikaji secara sistematis, komprehensif, dan kontekstual (Richards, 2018).

Ketidakseimbangan fokus ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata telah lama diakui sebagai kekuatan transformasional dalam masyarakat, banyak dampaknya yang bersifat sosial dan budaya masih belum dipahami secara utuh. Padahal, perubahan yang terjadi dalam sistem sosial dan budaya masyarakat lokal dapat bersifat mendalam dan berlangsung dalam jangka panjang, bahkan setelah aktivitas pariwisata itu sendiri menurun atau berhenti. Fenomena seperti erosi nilai gotong royong, pergeseran otoritas adat, perubahan pola komunikasi, dan munculnya gaya hidup konsumerisme adalah contoh konkret dari dampak pariwisata yang tidak terlihat secara kasat mata namun memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial masyarakat.

Kurangnya literatur yang berfokus pada aspek-aspek tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dalam perumusan kebijakan pariwisata yang benar-benar berbasis pada pemahaman sosial budaya lokal. Tanpa data dan analisis yang memadai, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri pariwisata cenderung bersifat generalisasi, dan tidak mempertimbangkan kompleksitas sosial yang melekat pada komunitas lokal. Oleh karena itu, sangat penting bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan interdisipliner yang tidak hanya menggabungkan perspektif ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menggali secara kritis aspek antropologis, sosiologis, dan kultural dalam konteks pariwisata alam.

Urgensi eksplorasi ini juga semakin tinggi mengingat meningkatnya tren pariwisata berbasis pengalaman dan keaslian budaya (experiential and cultural tourism), di mana wisatawan semakin mencari interaksi yang autentik dengan masyarakat lokal. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan norma masyarakat berubah akibat pariwisata, maka interaksi ini justru dapat menjadi sumber konflik kultural atau bentuk eksotisasi yang tidak etis. Oleh karena itu, penelitian yang menelaah bagaimana pariwisata memengaruhi tatanan sosial, relasi antarindividu dan kelompok, serta transformasi nilai-nilai komunitas menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak sosial budaya dari aktivitas pariwisata terhadap komunitas lokal di destinasi wisata alam. Fokus utama penelitian adalah memahami

bagaimana interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal membentuk realitas sosial baru, baik dalam bentuk adaptasi, resistensi, maupun transformasi budaya.

Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial budaya, khususnya di kawasan konservasi dan destinasi alam yang rentan terhadap tekanan pembangunan pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di tiga destinasi alam yang memiliki aktivitas pariwisata intensif, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kawasan Wisata Danau Toba, dan Taman Nasional Komodo. Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025. Populasi penelitian adalah komunitas lokal yang tinggal di sekitar destinasi wisata, sedangkan sampel diambil melalui teknik snowball sampling, melibatkan 25 informan kunci, termasuk tokoh adat, pelaku usaha wisata, dan warga lokal.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan pariwisata daerah. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, melalui proses coding, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata memiliki dampak multidimensional terhadap komunitas lokal, yang tercermin dalam perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Salah satu temuan utama adalah terjadinya perubahan struktur pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor jasa wisata, yang berdampak pada pola kerja dan pendapatan masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden kini bekerja sebagai pemandu wisata, pengrajin suvenir, atau pengelola homestay.

Dari sisi budaya, terdapat peningkatan interaksi antarbudaya antara masyarakat lokal dan wisatawan. Hal ini memperkaya wawasan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dilema terkait pelestarian tradisi. Banyak ritual adat yang kini disesuaikan waktunya untuk menyesuaikan dengan jadwal kunjungan wisatawan. Fenomena ini sesuai dengan temuan Cohen (1988) tentang 'staged authenticity' dalam pariwisata budaya.

Selain itu, terjadi proses komodifikasi budaya, di mana simbol-simbol budaya lokal digunakan untuk tujuan ekonomi. Misalnya, tarian tradisional ditampilkan secara rutin untuk hiburan wisatawan, bukan lagi untuk upacara adat. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya makna sakral budaya tersebut (Greenwood, 1989).

Ketimpangan sosial juga menjadi dampak penting yang teridentifikasi. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan jaringan pariwisata cenderung mendapatkan manfaat lebih besar, sementara kelompok lain mengalami marginalisasi. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Scheyvens (1999) dalam kajiannya tentang empowerment dalam pariwisata.

Meski demikian, beberapa komunitas berhasil mengembangkan model pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif. Di Desa Sembalun, misalnya, komunitas lokal membentuk koperasi wisata yang mengelola paket wisata, sehingga distribusi manfaat lebih merata. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendekatan partisipatif, pariwisata dapat memperkuat kohesi sosial dan identitas komunitas.

Kesimpulan

Pariwisata di destinasi wisata alam membawa dampak sosial budaya yang kompleks terhadap komunitas lokal. Dampak positif seperti peningkatan ekonomi dan pertukaran budaya terjadi berdampingan dengan tantangan seperti komodifikasi budaya, konflik sosial, dan erosi nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, serta kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan sosial dan budaya. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah melakukan studi longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang pariwisata terhadap dinamika sosial komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak pengelola taman nasional, komunitas lokal, serta Universitas Mataram yang telah mendukung proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Daftar Pustaka

- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(88\)90028-X](https://doi.org/10.1016/0160-7383(88)90028-X)
- Cole, S. (2007). Beyond authenticity and commodification. *Annals of Tourism Research*, 34(4), 943–960. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.05.004>
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2006). *Tourism and global environmental change: Ecological, social, economic and political interrelationships*. Routledge.
- Greenwood, D. J. (1989). Culture by the pound: An anthropological perspective on tourism as cultural commodification. In V. L. Smith (Ed.), *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism* (pp. 171–186). University of Pennsylvania Press.
- Jamal, T., & Camargo, B. A. (2014). Sustainable tourism, justice and an ethics of care. *Tourism Recreation Research*, 39(1), 9–20. <https://doi.org/10.1080/02508281.2014.11081321>
- Keane, M. (1992). Rural tourism and rural development. In *Tourism and the environment: Regional, economic and policy issues* (pp. 43–55). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Mbaiwa, J. E. (2011). Changes on traditional livelihood activities and lifestyles caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana. *Tourism Management*, 32(5), 1050–1060. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.09.002>
- Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005>
- Salazar, N. B. (2012). Community-based cultural tourism: Issues, threats and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 9–22. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.596279>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Smith, M. K., & Robinson, M. (2006). *Cultural tourism in a changing world: Politics, participation and (re)presentation*. Channel View Publications.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tour (REST).
- Timothy, D. J. (2011). *Cultural heritage and tourism: An introduction*. Channel View Publications.
- Wearing, S., & McDonald, M. (2002). The development of community-based tourism: Re-thinking the relationship between tour operators and development agents as intermediaries in rural and isolated area communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(3), 191–206. <https://doi.org/10.1080/09669580208667162>

Zapata, M. J., Hall, C. M., Lindo, P., & Vanderschaeghe, M. (2013). Can community-based tourism contribute to development and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. *Current Issues in Tourism*, 14(8), 725–749. <https://doi.org/10.1080/13683500.2011.559200>